



STRENGTHENING THE IDENTITY, ENRICHING REGIONAL COMMONALITY

PROCEEDINGS OF 12TH

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MALAYSIA - INDONESIA RELATIONS (PAHMI 12)

HISTORICAL AND CONTEMPORARY PERSPECTIVE OF MALAYSIA-INDONESIA RELATIONS

MALAYSIA AND INDONESIA IN ASEAN REGIONALIZATION

ECONOMY, ENTREPRENEURSHIP, LABOUR, TRADE AND DEVELOPMENT

DISASTER, SECURITY, LAW AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

MIGRATION, DIASPORA, CULTURAL RELATIONS, COMMONALITY AND SHARED HERITAGE

COMPARATIVE EDUCATION, LITERATURE, RELIGION, AND PHILOSOPHY

MEDIA, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Edited and compiled
by

Hanafi Hussin

Safiah @Yusmah Muhammad Yusoff

Ahmed Hilmi Mohamed Noor

FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES,
UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA LUMPUR
1st-2nd AUGUST 2018

PAHMI 12



UNIVERSITY
OF MALAYA

SWISS' MEMBERSHIP IN SCHENGEN: A CASE STUDY FOR ASEAN (240)

Muhammad Rezan Hasibuan & Ari Anggari Harapan
French Studies Program, Faculty of Humanity, Universitas Indonesia

ISSUE OF MINORITIES ROHINGYA IN MYANMAR: SECURITY IMPLICATIONS FOR ASEAN (250)

Ma Tin Cho Mar & Hanafi Hussin
Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

THE BOLOGNA PROCESS AND ASEAN UNIVERSITY NETWORK (255)

Asya Qaniaputri & Ari Anggari Harapan
French Studies Program Faculty of Humanity, Universitas Indonesia

POLITIC AND SOCIAL ISSUES AND DEVELOPMENT IN MALAYSIA AND INDONESIA

THE LEVEL OF MASTERY STUDENTS TOWARDS SOCIAL WORK EDUCATIONAL STANDARDS IN UNIVERSITY OF MALAYA (264)

Nurzaimah binti Asalah & Prof. Madya Dr. Haris Abd Wahab
Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya

✓ **PROVINCIAL PROBLEM AND DECREASING OF ISLAMIC PARTY INFLUENCES IN WEST SUMATERA (271)**

✓ Syafrizal
Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang

WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION IN THE 2014 ELECTION (279)

Nur Hidayah, Puji Lestari & V. Indah Sri Pinasti
Sociology Education Department, Yogyakarta State University

DEMOCRATIC EDUCATION IN SOSIOCULTURAL PERSPECTIVE AND ITS IMPLICATIONS TO CIVIC COMPETENCES ON BANYUMASAN SOCIETY (288)

Elly Hasan Sadeli, Zamroni, & Dr. Nasiwan
University of Muhammadiyah Purwokerto & Yogyakarta State University

BARRIERS TO EDUCATION AMONG THE STREETS CHILDREN IN KUALA LUMPUR (297)

Sabri Sulaiman, Haris Abd Wahab & Siti Hajar Abu Bakar Ah
Department of Social Administration and Social Justice, University of Malaya, Kuala Lumpur

SOCIAL WELL-BEING OF DISABLED CHILDREN IN MALAYSIA: A CASE STUDY IN KLANG VALLEY (297)

Siti Hajar Abu Bakar Ah & Noralina Omar
Department of Social Administration and Justice, Faculty of Arts and Social Sciences
University of Malaya

YOUTH DIGITAL LITERACY EDUCATION IN BANDUNG CITY (298)

PROVINCIAL PROBLEM AND DECREASING OF ISLAMIC PARTY INFLUENCES IN WEST SUMATERA

Syafrizal
Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang
(syafrizalsirin@yahoo.co.id)

Abstract

Entering the 1950's the relationship of the society of West Sumatra (Provinsi Sumatera Tengah) with the Central Government of the Republic of Indonesia (RI) worsened. Relating to this context, in February 1958 a Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (RI) was found. This newly formed government declared against the central government. The government dispatched Indonesian Arms Forces (APRI) to West Sumatra to quell the PRRI movement, which resulted in the peace restoring of West Sumatra since 1961. This paper discusses the turbulent relationship of PRRI with the decline of Islamic parties influence in West Sumatra. Prior to the disturbances in question, the influence of Islamic parties was as hard as a rock in West Sumatra, as noticed in the 1955 Election, which was the first election in Indonesia. Two Islamic parties, namely Masyumi dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), succeeded in securing the first and second rank, respectively, in earning the votes of 1955 Election. The situation differed in the following elections that were held after the local turbulent time, Islamic parties no longer have a strong influence. The regional upheaval caused by PRRI is seen as the main culprit of declining influence of Islamic parties in West Sumatra.

Keywords: Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI), Islamic Party, Election

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) yang pertama di Indonesia baru bisa diselenggarakan pada bulan September 1955, yaitu setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Dari Pemilu 1955 itu muncul empat partai besar di Indonesia yang berhasil mendapatkan banyak suara pemilih. Keempat partai dimaksud adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) pada posisi yang pertama, lalu disusul oleh partai Masyumi pada urutan kedua, sedangkan posisi ketiga dan keempat masing-masing ditempati oleh Nahdathul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹ PNI mengantongi suara sebanyak 8.434.653 suara (22,30%), lalu Partai Masyumi mendapatkan 7.903.886 suara (20,90%), meskipun terdapat perbedaan jumlah suara namun kedua partai itu sama-sama mendapatkan 57 kursi di parlemen. Partai NU mendapatkan 45 kursi, dan sebanyak 39 kursi diperoleh oleh PKI, sedangkan partai politik lainnya seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) masing-masingnya mendapatkan kurang dari 10 kursi.²

PNI sebagai pemenang dalam Pemilu 1955 mendapatkan suara terbanyak dari daerah pemilihan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dengan Partai Masyumi, yang merupakan partai politik berideologi Islam dari aliran reformisme, mengantongi sebagian besar suaranya dari berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang menjadi basis pendukung dan pemberi suara kepada Partai Masyumi adalah Sumatera Barat yang ketika itu merupakan wilayah inti dari Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi (Sumatera Barat).

Pengaruh partai Islam sangat kuat di wilayah Sumatera Barat sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga dekade 1950-an. Dua partai Islam yaitu Masyumi dan Perti

¹Anhar Gonggong, et al., *Sejarah Nasional Indonesia VI: Republik Indonesia Dari Proklamasi Sampai Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993), hal. 129-133.

²Herbert Feith, terj., *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal. 83-84.

mendominasi perolehan suara pada Pemilu 1955,³ namun mengalami kemunduran sejak dekade 1960-an. Pada pemilu-pemilu berikutnya mulai dari era Orde Baru hingga era reformasi partai-partai politik berlabel Islam tidak lagi berpengaruh kuat di Sumatera Barat seperti pada era sebelumnya.

Faktor utama yang menyebabkan merosotnya pengaruh partai-partai politik Islam di Sumatera Barat setelah Pemilu 1955 adalah pergolakan daerah, yang ditimbulkan oleh gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sepanjang tahun 1958-1961. Tulisan ini membahas kaitan pergolakan daerah atau gerakan PRRI dengan merosotnya pengaruh partai-partai Islam di Sumatera Barat, terutama Partai Masyumi dan Partai Perti. Batasan temporal yang dipelajari meliputi tahun 1958 atau awal dimulainya PRRI sampai dengan tahun 1971 yaitu saat diselenggarakannya pemilu yang kedua di Indonesia. Hasil Pemilu 1971 memperlihatkan merosotnya perolehan suara partai-partai Islam di Sumatera Barat, kecenderungan seperti itu terus berlanjut ke era pasca 1971.

Partai Islam Di Sumatera Barat Sebelum PRRI

Wilayah Sumatera Barat pada awal kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera.⁴ Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia pada awal kemerdekaan masih mengikuti pembagian wilayah pemerintahan yang disusun Belanda pada tahun 1920-an. Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sumatera, dan setiap provinsi membawahi beberapa keresidenan.

Status keresidenan bagi wilayah Sumatera Barat bertahan hingga berakhirnya perang kemerdekaan menghadapi Belanda, yang ingin mengembalikan jajahannya di Indonesia selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum dihapusnya status keresidenan, suasana darurat yang ditimbulkan oleh Agresi Militer Belanda Kedua pada akhir tahun 1948 maka wilayah Sumatera Barat sempat dijadikan sebagai sebuah gubernuran yang dipimpin oleh seorang gubernur militer. Residen Mr. Sutan Mohammad Rasjid diangkat menjadi Gubernur Militer Sumatera Barat, dan gejala serupa juga terjadi pada semua keresidenan di Pulau Sumatera.⁵ Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah.

Bersamaan dengan pembentukan tiga provinsi di Sumatera, maka status keresidenan dihapuskan sehingga di bawah unit provinsi langsung terdapat unit pemerintahan kabupaten dan kotapraja. Bekas wilayah Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi disatukan ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera Tengah mulai aktif pada tanggal 1 Februari 1950, pusat pemerintahan berada di Kota Bukittinggi. Wilayah pemerintahan Sumatera Tengah terbagi atas 14 kabupaten dan 2 kota besar dengan rincian 8 kabupaten berada di wilayah Sumatera Barat, 4 kabupaten di Riau, dan 2 kabupaten berada di Jambi, sedangkan 2 kota besar yaitu Padang dan Bukittinggi yang keduanya berada di Sumatera Barat.⁶ Keberadaan Provinsi Sumatera Tengah berlanjut hingga meletusnya gerakan PRRI di Sumatera Barat.

Sebagian besar wilayah Sumatera Barat ditempati oleh etnis Minangkabau yang dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat. Tidaklah mengherankan kalau di wilayah Sumatera Barat berkembang ungkapan "Adat bersendi Syarak (agama Islam), dan Syarak bersendi Kitabullah (Al-Quran)." Menurut tradisi yang berlaku dalam kehidupan etnis

³Herbert Feith, terj., *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal. 83-84.

⁴Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan ditugaskan pemerintah pusat RI untuk membentuk 10 keresidenan di Provinsi Sumatera. Informasi lebih jauh dikemukakan dalam Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 32-35.

⁵Ahamad Husein, et al., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. Di Minangkabau/Riau 1949-1950 Jilid II* (Jakarta: BP5IM, 1992), hal. 44-48.

⁶Gusti Asnan, *Pemerintah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal. 135-137.

Minangkabau, setiap suku (kaum) diharuskan memiliki minimal satu surau tempat belajar agama, dan setiap nagari diharuskan memiliki paling tidak satu unit masjid.⁷

Etnis Minangkabau adalah penganut agama Islam yang dinamis dan kreatif, mentalitas seperti itulah yang mendorong terjadinya beberapa kali gerakan pembaharuan terhadap ajaran Islam di Sumatera Barat. Pembaharuan gelombang pertama dilakukan oleh Kaum Paderi yang dipimpin oleh beberapa orang ulama seperti haji Sumanik dan Haji Piobang yang baru saja pulang dari Tanah Suci Mekkah. Gerakan pembaharuan itu dikenal dengan sebutan Gerakan Paderi yang berlangsung dari tahun 1803 sampai dengan tahun 1821. Pembaharuan yang dilakukan Kaum Paderi bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai penyimpangan seperti pengeramatan kuburan, kebiasaan meminum tuak, dan menghisap candu.⁸

Gerakan Paderi menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di pedalaman Sumatera Barat. Untuk mengatasi kerusuhan itu, maka beberapa orang penghulu (pemuka masyarakat) dari wilayah pedalaman Minangkabau meminta bantuan pemerintahan kolonial Belanda, yang telah terbentuk di Padang sejak tahun 1819. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 10 Februari 1821,⁹ yang mengawali intervensi Belanda dalam mengatasi kerusuhan akibat Gerakan Paderi.

Intervensi Belanda menimbulkan perlawanan orang Minangkabau, sehingga terjadilah Perang Paderi yang dimenangkan oleh Belanda pada tahun 1837. Sejak berakhirnya Perang Paderi maka dimulai pulalah era penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil menguasai seluruh Sumatera Barat mulai dari kawasan pesisir hingga kawasan pedalaman.

Kehadiran Belanda di Sumatera Barat membawa corak baru di bidang kebudayaan seperti meliputi bentuk pakaian dan gaya hidup. Selain itu Belanda juga memperkenalkan lembaga pendidikan moderen yang bersifat sekuler seperti *Normal School*, *Volkschool*, *Vervolgschool*, dan *Holland Inlandsce School* (HIS) guna mendidik rakyat pribumi menjadi calon tenaga pegawai yang terdidik.¹⁰ Keberadaan kebudayaan moderen yang dibawa bangsa Belanda itu mendorong terjadinya gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan ulama *Kaum Muda* di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-20. Gerakan *Kaum Muda* menganjurkan umat Islam agar bersikap terbuka terhadap pengaruh kebudayaan Barat. Umat Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sejauh tidak bertentangan dengan keimanan.

Salah seorang tokoh gerakan *Kaum Muda* adalah DR. Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) yang lahir di Maninjau pada tahun 1879.¹¹ Ia merintis pendidikan Islam bercorak moderen melalui Surau Jembatan Besi di Padangpanjang dalam tahun 1910-an. Selain belajar pengetahuan agama, murid Surau Jembatan Besi juga diajarkan pengetahuan sekuler seperti kimia, bahasa Belanda, geografi dan sejarah. Penyelenggaraan pendidikan meniru sekolah Belanda yaitu memakai kelas, papan tulis, buku, ujian, rapor, murid memakai kemeja dan boleh bersepatu.¹² Model sekolah yang sama juga berdiri di Parabek dekat Bukittinggi, Padangjapang dekat Payakumbuh, Maninjau dan lain-lain.

Ide modernism Islam yang digerakkan oleh *Kaum Muda* semakin berkembang setelah masuknya pengaruh organisasi pembaharuan Islam Muhammadiyah dari Jawa ke Sumatera Barat. Dalam tahun 1929 sudah berdiri cabang-cabang Muhammadiyah pada beberapa tempat di Sumatera Barat seperti di Maninjau, Padangpanjang, Batusangkar,

⁷Umar Junus, "Kebudayaan Minangkabau", dalam Koentjaraningrat, ed., *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 243-244 dan 255 dan 256.

⁸Christine Dobbin, terj., *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847* (Jakarta: INIS, 1992), hal. 152-156.

⁹*Ibid.*, hal. 172.

¹⁰Keberadaan lembaga pendidikan modern yang bersifat sekuler di Sumatera Barat sejak pertengahan abad ke-19 dapat ditelusuri dalam Elizabeth E.Graves, terj., *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), bab 5 dan bab 6.

¹¹Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 37-40.

¹²Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), hal. 79-121.

Payakumbuh, Pariaman, dan Padang.¹³ Menurut Taufik Abdullah, *Kaum Muda* lebih dominan pengaruhnya sehingga wilayah Sumatera Barat muncul menjadi kawasan yang dikuasai ide-ide modernism Islam.¹⁴

Setelah Indonesia merdeka pemerintah RI segera menggalang kekuatan politik dari kalangan rakyat, pemerintah dengan Maklumat No. X/1945 menghimbau agar rakyat membentuk partai-partai politik guna menyalurkan paham mereka secara teratur. *Kaum Muda* Sumatera Barat segera meresponi seruan pemerintah itu dengan membentuk Partai MIT (Majelis Islam Tinggi) di Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1945, sementara ulama dan pengikut *Kaum Tua* telah duluan mendirikan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).¹⁵ Pada bulan Februari 1946 Partai MIT berubah menjadi cabang Partai Masyumi di Sumatera Barat.¹⁶

Dari awal kemerdekaan hingga Pemilu 1955 Masyumi merupakan partai Islam yang paling berpengaruh di Sumatera Barat. Pendukungnya adalah pengikut paham *Kaum Muda* termasuk Muhammadiyah. Beberapa orang aktivis Masyumi menempati berbagai jabatan penting di Sumatera Barat pada awal kemerdekaan seperti Marzuki Yatim menjadi Wakil Ketua KNID (Komite Nasional Indonesia daerah), dan Saalah Yusuf Sutan Mangkuto menjadi Bupati Solok.¹⁷ Selain itu diangkat pula Nasruddin Thaha menjadi Kepala Jawatan Agama, Malik Ahmad sebagai Kepala Jawatan Sosial, dan Diar Karim menjadi Kepala Jawatan Pendidikan adalah juga kader Masyumi.¹⁸ Pengaruh Partai Masyumi juga terlihat ketika dilakukan pemilihan wali nagari secara serentak di Sumatera Barat pada pertengahan tahun 1946, sekitar 90% kader Masyumi terpilih menjadi wali nagari.¹⁹

Pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, dua partai Islam yaitu Masyumi dan Perti mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua di Sumatera Tengah. Dari Daerah pemilihan Sumatera Tengah Masyumi mendapatkan 797.692 suara, disusul Perti sebanyak 351.768 suara.²⁰ Perolehan suara kedua partai politik Islam di Sumatera Tengah itu sebagian besar diperoleh dari wilayah Sumatera Barat. Dari 1.187.348 orang pemilih telah memberikan suaranya sebanyak 510.854 untuk Masyumi dan 290.393 suara untuk Perti.²¹

Pergolakan Daerah dan Kemunduran Partai Islam

Pasca Pemilu 1955 hubungan pemerintah pusat dengan daerah Sumatera Barat memburuk, indikasinya mulai terlihat ketika diadakan reuni bekas anggota Divisi Banteng. Divisi Banteng merupakan Divisi III/TKR Sumatera Tengah yang berhasil menjadikan wilayah Sumatera Barat sebagai benteng RI, sehingga Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bisa bermarkas dengan aman di Sumatera Barat. Pada bulan Oktober 1949 yaitu ketika perang kemerdekaan akan berakhir, maka pemerintah menciutkan Divisi Banteng menjadi satu brigade di bawah komando Medan.

¹³Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982), hal. 150 dan 307.

¹⁴Taufik Abdullah, "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century, dalam Claire Holt, ed., *Culture And Politics in Indonesia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1972), hal. 181-182.

¹⁵Partai-partai politik yang terbentuk di Sumatera Barat pada awal kemerdekaan dikemukakan dalam Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sumatera Tengah* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hal.459-464.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), hal. 278.

¹⁸Elpa Handayani, "Sejarah Masyumi di Sumatera Barat 1945-1960", *Skripsi Jurusan Sejarah* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1991), hal. 44.

¹⁹Audrey Kahin, terj., *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional 1945-1950* (Padang: MSI Sumatera Barat, 1997), hal. 165-166.

²⁰Herbert Feith, *op.cit.*, hal. 68.

²¹Hasil lengkap Pemilu 1955 di Sumatera Barat dapat ditelusuri dalam Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* (Jakarta: Leknas LIPI, 1971), hal. 105-114.

Penciutan Divisi Banteng menyebabkan sebagian prajurit terpaksa diberhentikan, tindakan itu menurut R.Z.Leirissa terasa seperti "habis manis sepah dibuang".²² Akibatnya sebagian masyarakat Sumatera Barat kecewa terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan masyarakat juga bertambah ketika pemerintah pusat mengangkat Ruslan Muljohardjo, seorang birokrat dari etnis Jawa, menjadi Gubernur Sumatera Tengah pada awal tahun 1950.²³ Kebijakan pemerintah pusat itu ditafsirkan telah mengecilkan kemampuan etnis Minangkabau, padahal mereka berperan penting dalam melahirkan dan memimpin RI pada waktu itu.²⁴

Reaksi terhadap tindakan pemerintah pusat itu mewarnai suasana reuni bekas anggota Divisi Banteng pada tanggal 21-24 November 1956 di Padang.²⁵ Keputusan reuni antara lain adalah menuntut otonomi daerah, dan dihapuskannya sentralisasi birokrasi.²⁶ Tuntutan tersebut bertujuan agar putera daerah diberi kesempatan untuk mengatur daerahnya, mengingat berbagai jabatan di Sumatera Tengah ketika itu seperti gubernur, kepala kejaksaan, dan kepala jawatan penerangan diduduki oleh etnis Jawa.²⁷

Untuk memperjuangkan keputusan reuni maka dibentuk Dewan Banteng yang diketuai oleh Letkol Ahmad Husein, memiliki sebanyak 17 anggota yang mewakili berbagai golongan dalam masyarakat seperti ulama, ninik-mamak, dan tokoh pemerintahan.²⁸ Aspirasi reuni disampaikan kepada Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo guna diteruskan kepada pemerintah pusat, namun tidak berjalan dan malahan pada tanggal 20 Desember 1956 Gubernur Ruslan menyerahkan jabatannya kepada Letkol Ahmad Husein.²⁹

Partai Masyumi mendukung tuntutan daerah Sumatera Tengah (dan Sumatera Barat), mengingat dari daerah itulah Masyumi mendapatkan banyak suara pada Pemilu 1955. Dalam Kongres Masyumi di Bandung pada bulan Desember 1956 dibahas soal pergolakan daerah, dan menuntut Kabinet Ali Sastroamidjojo membubarkan diri karena dinilai tidak mampu mengatasi krisis daerah.³⁰ Selain itu Masyumi kemudian juga menolak Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 yang bertujuan membentuk sebuah kabinet gotong royong dengan mengikutsertakan PKI.³¹ Masyumi adalah merupakan partai Islam yang sangat anti pada PKI, seperti yang sering mengemuka pada kampanye untuk Pemilu 1955.

Pada awal tahun 1958 beberapa orang tokoh Masyumi yaitu Moh. Natsir, Mr. Burhanuddin Harahap, dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara merasa tidak aman di Jakarta sehingga memutuskan untuk bergabung dengan perwira daerah bergolak guna menekan pemerintah pusat.³² Pemerintah ternyata tidak proaktif dalam menanggapi tuntutan daerah, sehingga Ketua Dewan Banteng Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum itu antara lain adalah agar Kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya dalam waktu 5 X 24 jam, lalu mengangkat Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai formatur kabinet baru yang jujur dan anti komunis.³³

Ultimatum itu ditolak oleh pemerintah pusat, dan Ahmad Husein kemudian mengumumkan terbentuknya PRRI beserta susunan Kabinet PRRI pada tanggal 15 Februari 1958. Beberapa orang tokoh Masyumi duduk dalam Kabinet PRRI yaitu Mr.

²²R.Z.Leirissa, *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 35-36.

²³Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 312-313.

²⁴Ichlasuk Amal, "Hubungan Pusat-Daerah: Kasus Sumatera Barat Dan Sulawesi Selatan", dalam *Prisma* (No. 12, 1985), hal. 73-76.

²⁵R.Z.Leirissa, *op.cit.*, hal. 37-38.

²⁶*Ibid.*, hal. 39-41.

²⁷A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hal. 8-9.

²⁸R.Z.Leirissa, *op.cit.*, hal. 41-44.

²⁹*Ibid.*, hal. 56-57.

³⁰Soebagijo, I.N., *Jusuf Wibisono: Karang Di Tengah Gelombang* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), hal. 197.

³¹Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1978), hal. 355-357.

³²Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), hal. 374-375.

³³Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1980), hal. 209-210.

Sjafruddin Prawiranegara menjadi perdana menteri merangkap menteri keuangan, Mr. Burhanuddin Harahap menjadi menteri kehakiman.³⁴ PRRI didukung oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, kecuali orang-orang PKI. Menurut R.Z.Leirissa, semangat pembangunan dan anti komunisme telah menyatukan rakyat Sumatera Barat dengan gerakan PRRI.³⁵

Untuk mengamankan daerah Sumatera Barat yang merupakan pusat PRRI, maka pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) menyiapkan "Operasi 17 Agustus" yang dikomandani Kolonel Ahmad Jani. Pasukan APRI memulai serangannya pada tanggal 17 April 1958, dan pada hari itu juga kota Padang dapat diduduki.³⁶ Pada bulan Mei 1958 semua kota-kota pusat pemerintahan berhasil direbut oleh pasukan APRI, sementara orang-orang PRRI melakukan gerilya di wilayah pedesaan.

Pada tahap awal berlangsungnya operasi militer APRI, kegiatan administrasi pemerintahan lumpuh, pejabat dan pegawai melakukan pengungsian guna menyelamatkan diri. Untuk menghidupkan kembali pemerintahan, maka pemerintah pusat membentuk Provinsi Sumatera Barat, dan pada tanggal 17 Mei 1958 Kaharuddin Datuk Rangkyo Basa diangkat menjadi Gubernur Sumatera Barat.³⁷ Banyak pejabat dan pegawai pemerintahan kembali dari daerah pengungsian untuk bekerja lagi seperti biasa. Dalam tahun 1961 keamanan di daerah Sumatera Barat berhasil dipulihkan kembali, karena sebagian besar tokoh dan pengikut PRRI telah menyetahkan diri ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Pergolakan daerah di Sumatera Barat telah mengakibatkan hancurnya kekuatan Partai Masyumi. Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, yang menegaskan bahwa partai politik akan diakui keberadaannya bilamana partai bersangkutan menggunakan jalan damai dan demokratis dalam mencapai tujuannya.³⁸ Masyumi terpaksa dibubarkan karena sebagian pemimpin dan pengikutnya terlibat dalam gerakan PRRI. Kader Masyumi terpaksa diberhentikan dari anggota dewan legislatif, guru dan pegawai pemerintahan, mereka digantikan oleh orang-orang berpaham kiri (PKI).

PKI boleh dikatakan satu-satunya partai politik yang anti dan tidak terlibat dalam gerakan PRRI, sehingga mendominasi peta perpolitikan di Sumatera Barat pasca pergolakan daerah hingga meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Partai Perti yang merupakan pemenang kedua di Sumatera Barat pada Pemilu 1955, terpaksa melakukan politik akomodatif dengan kondisi politik pasca pergolakan dan tuntutan Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks itulah misalnya Pimpinan Perti H.Siradjuddin Abbas sering mengikuti kongres luar negeri yang diselenggarakan negara-negara komunis.³⁹ Menjelang meletusnya Peristiwa G30S 1965 Perti mengalami perpecahan, terdapat kelompok yang mendukung ideologi komunis (Nasakom) yaitu kelompok Siradjuddin Abbas pada tingkat pusat dan Munjar Attiny di Sumatera Barat, dan kedua yaitu kelompok Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyik Tjandung) yang memilih kegiatan di luar bidang politik.⁴⁰

Tidak lama setelah Peristiwa G30S 1965, kekuasaan Presiden RI beralih ke tangan Soeharto, dan Indonesia memasuki era Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menggagas pelaksanaan pemilu pada bulan Juli 1971, yang merupakan pemilu kedua di Indonesia. Presiden Soeharto mengizinkan pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai penerus aliran politik Masyumi. Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 70 Tahun 1968 tanggal 20 Februari 1968 yang mengakui berdirinya secara sah Parmusi,⁴¹ namun ditegaskan oleh pemerintah bahwa kepengurusan partai tidak boleh melibatkan bekas tokoh Masyumi baik pada tingkat pusat maupun daerah.

³⁴A.H.Nasution, *op.cit.*, hal. 184-185.

³⁵R.Z.Leirissa, *op.cit.*, hal. 59-60.

³⁶A.H.Nasution, *op.cit.*, hal. 238-240.

³⁷*Mimbar Indonesia* (Mingguan Independen, 9 Agustus 1958), hal. 11.

³⁸Deliar Noer, *Partai Islam...*, *op.cit.*, hal. 383.

³⁹*Ibid.*, hal. 396-397.

⁴⁰A.A.Navis, "Alur Kebudayaan Minangkabau Dalam Tingkah Laku Gerakan Politik Di Minangkabau", dalam A.A.Navis, ed., *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Dan Politik* (Padang: Genta Singgalang Press, 1983), penjelasan pada catatan kaki hal. 89.

⁴¹"Partai Muslimin Indonesia Disahkan", dalam *Harian Kompas* (21 Februari 1968), hal. I dan III.

Sementara itu, pengikut Perti dari kelompok Inyik Tjandung menyatakan keluar dari Perti sebagai partai politik, dan memilih bertahan dalam Perti sebagai organisasi pendidikan. Mereka menyatakan bergabung ke dalam Golongan Karya (Golkar), yaitu organisasi politik yang dibesarkan militer dan rezim Orde Baru, menghadapi Pemilu 1971.⁴² Langkah serupa juga diikuti oleh ulama dan tokoh-tokoh Perti lainnya bersama barisan pengikutnya.⁴³ Perpecahan Perti telah mengakibatkan lemahnya pengaruh partai itu dalam menghadapi Pemilu 1971.

Parmusi dan Perti serta delapan partai dan organisasi politik lainnya menjadi kontestan yang bertarung dalam perebutan suara pada Pemilu 1971. Pergolakan daerah beserta akibat yang ditimbulkannya telah mengubah peta kekuatan politik di Sumatera Barat. Semula Parmusi (dulu Masyumi) dan Perti merupakan dua buah partai Islam yang berpengaruh di Sumatera Barat, maka setelah era pergolakan daerah kedua partai itu mengalami kemunduran.

Dalam Pemilu 1971 di Sumatera Barat, dari 1.206.326 suara sah maka sebanyak 762.241 suara (63,19%) dikantongi oleh Golkar, yaitu organisasi politik pemerintah yang dipimpin oleh aparat militer. Parmusi menempati posisi kedua dengan mendapatkan 274.682 suara (22,77%), dan Perti pada tempat ketiga dengan mengantongi 84.063 suara (6,97%).⁴⁴ Tujuh kontestan lainnya mendapatkan suara antara 0,41% sampai dengan 2,96%.

Kesimpulan

Semenjak permulaan abad ke-20 wilayah Sumatera Barat didominasi oleh ide-ide modernisme Islam yang diperkenalkan oleh *Kaum Muda*. Mereka bersikap terbuka terhadap pengaruh kebudayaan Barat (Belanda) terutama di bidang pendidikan, sejauh tidak bertentangan dengan akidah atau nilai-nilai keislaman. Pada awal kemerdekaan ulama dan pendukung gerakan *Kaum Muda* menyalurkan aliran politiknya ke dalam partai Masyumi. Tidaklah mengherankan kalau Masyumi berkembang menjadi partai Islam yang paling berpengaruh di Sumatera Barat. Kemudian disusul oleh partai *Kaum Tua* yaitu Perti, sebuah partai Islam beraliran konservatif.

Setelah era pergolakan daerah tahun 1958-1961, pengaruh kedua partai Islam itu menurun drastis. Keterlibatan tokoh dan pendukung Masyumi dalam gerakan PRRI telah melemahkan ketangguhan partai Parmusi (pewaris aliran Masyumi) dalam Pemilu 1971. Sementara itu, perpecahan yang melanda Perti pasca pergolakan daerah, menyebabkan sebagian pengikutnya menyatakan keluar dari partai dan bergabung dengan Golkar pada Pemilu 1971. Selama era Orde Baru (1966-1998) Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu di Sumatera Barat. Memasuki era reformasi partai Islam tidak pernah menempati posisi kesatu dan kedua dalam tingkatan perolehan suara pada setiap pemilu (1999, 2004, 2009 dan 2014). Tiga partai besar yang berpengaruh di Sumatera Barat sejak awal reformasi hingga dewasa ini adalah Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1972. "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century", dalam Claire Holt, ed. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Alfian, 1971. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*. Djakarta: Leknas LIPI.
- Amal, Ichlasul, 1985. "Hubungan Pusat-Daerah: Kasus Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan", *Majalah Prisma* No. 12.
- Asnan, Gusti, 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.

⁴²Harian *Haluan* (28 Mei 1971), hal. I.

⁴³Harian *Haluan* (12 dan Februari 1971), hal. I dan IV.

⁴⁴Harian *Haluan* (4 Agustus 1971), hal. I dan IV.

- Daya, Burhanuddin, 1990. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dobbin, Christine, terj., 1992. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847*. Jakarta: INIS.
- Feith, Herbert, terj., 1999. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gonggong, Anhar, et al., 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI: Republik Indonesia Dari Proklamasi Sampai Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Graves, Elizabeth E, terj., 2007. *Asal-Usul Elite Minangkabau Moderen: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamka, 1982. *Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: Umminda.
- Hamka, 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Handayani, Elpa, 1991. "Sejarah Masyumi di Sumatera Barat 1945-1960", *Skripsi Jurusan Sejarah*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Harian *Haluan*, tanggal 12 Februari 1971, 28 Mei 1971, dan 4 Agustus 1971.
- Harian *Kompas*, tanggal 21 Februari 1968.
- Husein, Ahmad, et al., 1992. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. Di Minangkabau/Riau 1949-1950 Jilid II*. Jakarta: BPSIM.
- Junus, Umar, 1985. "Kebudayaan Minangkabau", dalam Koentjaraningrat, ed., *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kahin, Audrey, terj., 1997. *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Padang: MSI Sumatera Barat.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953. *Propinsi Sumatera Tengah*. Djakarta: Kementerian Penerangan.
- Leirissa, R.Z., 1991. *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, A.H., 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4: Masa pancaroba Kedua*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Navis, A.A., 1983. "Alur Kebudayaan Minangkabau Dalam Tingkah laku Gerakan Politik di Minangkabau", dalam A.A.Navis, ed., *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press.
- Noer, Deliar, 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Noer, Deliar, 1991. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Rosidi, Ajip, 1980. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Zed, Mestika, 1997. *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.